

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara demokrasi yang mengutamakan hak dan kewajiban yang setara bagi semua warganya, termasuk dalam hal politik. Demokrasi adalah pemerintahan yang dibuat untuk, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang melindungi hak politik mereka untuk berpartisipasi politik dengan memilih dan mencalonkan diri dalam pemilu untuk legislatif dan eksekutif. Hal ini sangat berkaitan dengan fungsi partai politik sebagai platform utama sebelum calon legislatif dipilih.

Pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk berperan di eksekutif, yudikatif, legislatif, dan pemilu, demi mencapai keadilan dan kesejahteraan gender. Namun, kata "pemberian" dalam konteks keterwakilan perempuan seolah menunjukkan bahwa hak-hak politik perempuan hanyalah sebuah hadiah, sehingga perlu dikaji agar keterwakilan perempuan tidak hanya dipandang sebagai formalitas¹.

Keterwakilan perempuan di parlemen masih sangat rendah, meskipun pada Pasal 245 ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur bahwa partai politik harus menyertakan keterwakilan perempuan

¹ Rasyidin and Fidhia Aruni, *"Gender Dan Politik: Keterwakilan Wanita Dalam Politik,"* Unimal Press, no. April (2016): hlm 4.

dengan kuota minimal 30%. Kuota ini merupakan affirmative action untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik melalui pemilihan legislatif.

Upaya untuk menyempurnakan afirmatif action terus dilakukan agar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tercapai, salah satunya dengan sistem zipper yang menempatkan calon laki-laki dan perempuan secara bergantian dalam daftar pencalonan. Hak untuk mencalonkan diri, termasuk bagi perempuan, merupakan bagian dari hak politik yang didasarkan pada hak memilih dan hak untuk dipilih. Keterwakilan perempuan dalam pemilu sangat bergantung pada partisipasi perempuan itu sendiri.

Hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan termasuk partisipasi perempuan, baik sebagai kandidat maupun pemilih; hak ini didasarkan pada hak untuk memilih (hak untuk memilih) dan hak untuk mencalonkan diri (hak untuk mencalonkan diri). Jumlah pemilih perempuan dan tingkat partisipasi mereka sangat memengaruhi keterwakilan perempuan dalam pemilu.

Di Indonesia, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih rendah. Setiap pemilihan legislatif, calon laki-laki mendominasi lebih banyak dibandingkan calon perempuan, terutama dalam tahap pencalonan. Meskipun keikutsertaan perempuan meningkat, banyak yang gagal terpilih menjadi anggota parlemen. *Affirmative action* sebesar 30% dan sistem *zipper* belum mampu secara signifikan meningkatkan jumlah anggota parlemen perempuan, karena persepsi masyarakat terhadap kandidat perempuan masih negatif.

Meskipun partisipasi perempuan dalam pemilu meningkat, akan tetapi keterpilihan perempuan masih sangat rendah, terutama karena persepsi negatif masyarakat terhadap kandidat perempuan. Beberapa faktor yang dipertimbangkan pemilih adalah kecerdasan, integritas (bebas dari korupsi), dan pengalaman politik. Untuk meningkatkan efektivitas sistem *zipper*, diperlukan komitmen partai politik terhadap kuota gender serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran perempuan di parlemen.

Tabel 1. 1

Daftar Anggota DPRD Sumatera Utara Periode 2019-2024

No	NAMA WILAYAH	PERIODE							
		2019-2024				2024-2029			
		L	%	P	%	L	%	P	%
1	DPRD PROVINSI SUMUT 1	8	80%	2	20%	10	100%	0	0%
2	DPRD PROVINSI SUMUT 2	6	86%	1	14%	5	71%	2	29%
3	DPRD PROVINSI SUMUT 3	10	83%	2	17%	9	75%	3	25%
4	DPRD PROVINSI SUMUT 4	5	100%	0	0%	4	80%	1	20%
5	DPRD PROVINSI SUMUT 5	8	80%	2	20%	8	80%	2	20%
6	DPRD PROVINSI SUMUT 6	7	88%	1	13%	6	75%	2	25%
7	DPRD PROVINSI SUMUT 7	10	100%	0	0%	9	90%	1	10%
8	DPRD PROVINSI SUMUT 8	5	83%	1	17%	3	50%	3	50%
9	DPRD PROVINSI SUMUT 9	9	100%	0	0%	7	78%	2	22%

10	DPRD PROVINSI SUMUT 10	7	88%	1	13%	8	100%	0	0%
11	DPRD PROVINSI SUMUT 11	4	80%	1	20%	5	100%	0	0%
12	DPRD PROVINSI SUMUT 12	8	80%	2	20%	7	70%	3	30%
TOTAL		87		13		81		19	

Tabel 1. 2
Daftar Anggota DPRD Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara
Periode 2019-2024

No	NAMA WILAYAH	PERIODE							
		2019-2024				2024-2029			
		L	%	P	%	L	%	P	%
1	DPRD KAB.TAPANULI TENGAH	29	83%	6	17%	31	89%	4	11%
2	DPRD KAB. TAPANULI UTARA	33	92%	3	8%	33	94%	2	6%
3	DPRD KAB. TAPANULI SELATAN	29	91%	3	9%	32	91%	3	9%
4	DPRD KAB. NIAS	22	92%	2	8%	23	92%	2	8%
5	DPRD KAB. LANGKAT	44	86%	7	14%	45	90%	5	10%
6	DPRD KAB. KARO	26	74%	9	26%	31	78%	9	23%
7	DPRD KAB. DELI SERDANG	48	96%	2	4%	47	94%	3	6%
8	DPRD KAB. SIMALUNGUN	46	92%	4	8%	41	91%	4	9%
9	DPRD KAB. ASAHAN	33	73%	12	27%	38	84%	7	16%
10	DPRD KAB. LABUHANBATU	37	82%	8	18%	42	93%	3	7%
11	DPRD KAB. DAIRI	33	94%	2	6%	33	94%	2	6%
12	DPRD KAB. SAMOSIR	19	76%	6	24%	22	88%	3	12%

13	DPRD KAB. MANDAILING NATAL	34	85%	6	15%	37	93%	3	8%
14	DPRD KAB. NIAS SELATAN	29	83%	6	17%	33	94%	2	6%
15	DPRD KAB. PAKPAK BHARAT	18	90%	2	10%	19	95%	1	5%
16	DPRD KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	21	84%	4	16%	29	95%	1	5%
17	DPRD KAB. TOBA	29	97%	1	3%	26	87%	4	13%
18	DPRD KAB. SERDANG BEDAGAI	39	87%	6	13%	40	89%	5	11%
19	DPRD KAB. BATU BARA	34	97%	1	3%	35	88%	5	13%
20	DPRD KAB. PADANG LAWAS UTARA	28	93%	2	7%	27	90%	3	10%
21	DPRD KAB. PADANG LAWAS	27	90%	3	10%	30	100%	0	0%
22	DPRD KAB. LABUHANBATU SELATAN	32	91%	3	9%	32	91%	3	9%
23	DPRD KAB. LABUHANBATU UTARA	34	97%	1	3%	34	97%	1	3%
24	DPRD KAB. NIAS UTARA	23	92%	2	8%	23	92%	2	8%
25	DPRD KAB. NIAS BARAT	18	90%	2	10%	17	85%	3	15%
26	DPRD KOTA MEDAN	45	90%	5	10%	42	84%	8	16%
27	DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR	27	90%	3	10%	26	87%	4	13%

28	DPRD KOTA SIBOLGA	16	80%	4	20%	17	85%	3	15%
29	DPRD KOTA TANJUNG BALAI	18	72%	7	28%	17	68%	8	32%
30	DPRD KOTA BINJAI	25	83%	5	17%	30	86%	5	14%
31	DPRD KOTA GUNUNG SITOLI	23	92%	2	8%	22	88%	3	12%
32	DPRD KOTA PADANG SIDEMPUAN	27	90%	3	10%	22	73%	8	27%
33	DPRD KOTA TEBING TINGGI	24	96%	1	4%	21	84%	4	16%
TOTAL		970		133		997		123	

Sumber: KPU Sumatera Utara

Tabel ini menggambarkan sistem patriarki terhadap keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2019-2024. Dari data terlihat bahwa di beberapa dapil, seperti Dapil 1, keterwakilan perempuan masih nol persen, yang mengindikasikan dominasi laki-laki dalam posisi kekuasaan politik. Meskipun ada dapil seperti Dapil 8 yang menunjukkan 50% keterwakilan perempuan, sebagian besar dapil lainnya masih didominasi laki-laki dengan persentase perempuan yang rendah. Hal ini mencerminkan bagaimana sistem patriarki masih menjadi penghalang utama bagi perempuan untuk mendapatkan akses yang setara dalam ruang-ruang politik dan pengambilan keputusan. Ketidaksetaraan ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan, struktur sosial patriarki

di Sumatera Utara masih membatasi mereka untuk terlibat secara penuh dalam politik.

Data diatas merupakan daftar terpilih anggota legislatif sumatera utara pada periode 2019-2024. Terlihat bahwa keterpilihan perempuan menjadi anggota dewan masih belum mencapai 30%. meskipun ada kebijakan kuota 30% untuk perempuan dalam politik, nilai-nilai patriarki dalam masyarakat Batak sering kali menjadi penghalang bagi perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dan mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk menduduki posisi strategis. Akibatnya, perempuan di Sumut masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai keterwakilan yang seimbang di bidang politik. meskipun sistem zipper diterapkan. Dari 17 partai yang ikut dalam pemilu, pada periode 2024 hanya 33 perempuan yang berhasil lolos ke parlemen.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi perempuan, Yang pertama adalah metode kaderisasi dan rekrutmen internal partai yang tidak memperhatikan keterwakilan perempuan. Yang kedua adalah figur yang tidak mampu menarik perhatian publik. Ketiga, budaya patriarki masih kuat karena kurangnya pendidikan politik, yang menyebabkan calon

pemimpin perempuan dianggap tabu di beberapa daerah. Di seluruh dunia, hak perempuan untuk memilih dan mencalonkan diri adalah hak demokratis utama².

Dari semua pemilih yang memilih calon perempuan, ada sejumlah faktor yang memengaruhi keputusan mereka: 35% memilih karena kecerdasan (*intelligensi*), 26% memilih karena calon tidak melakukan korupsi (*lack of corruption*), dan 20% memilih karena pengalaman mereka dalam politik (*experiences in politics*).³ Berdasarkan penelitian ini, cara pertama yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan sistem *zipper* adalah partai politik harus berkomitmen untuk mematuhi kuota gender dalam sistem. Kedua, meskipun masyarakat di daerah ini masih cenderung patriarkis, masyarakat harus lebih menyadari pentingnya keterwakilan perempuan di parlemen.

Menurut Alfian Rokhmansyah dalam Ade Irma Sakina, Patriarki berasal dari kata Patriarkat, berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya. Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan

² Herdin Arie Saputra, Dyah Mutiarin, and Achmad Nurmandi, “*Analisis Wacana: Partisipasi Perempuan Dalam Politik Di Indonesia Tahun 2018 - 2019*,” Muwazah 12, no. 1 (2020), hlm 4: <https://doi.org/10.28918/muwazah.v12i1.2502>.

³ Mentari A. Ramadhianty, “*Mengoptimalkan Zipper System Keterwakilan Perempuan*,” March 8, last modified 2021, <https://rumahpemilu.org/mengoptimalkan-zipper-system-keterwakilan-perempuan/>.

ketidakadilan gender yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kegiatan manusia⁴.

Patriarki adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan dan memberikan kuasa yang lebih besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk keluarga, masyarakat, dan politik. Dalam masyarakat suku Batak yang masih kuat mempertahankan pola patriarkal, peran laki-laki dipandang lebih penting, sementara perempuan sering kali hanya dianggap sebagai pelengkap. Hal ini menciptakan struktur hierarkis yang tidak seimbang, di mana akses perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan seringkali terbatas.

Karakter patriarki terlihat dari adanya pembagian peran gender yang menempatkan perempuan pada wilayah domestik, sementara laki-laki dianggap lebih layak untuk memegang kendali di ruang publik. Pemahaman ini diperkuat oleh norma sosial dan budaya yang cenderung mempertahankan status quo, sehingga perempuan yang mencoba memasuki wilayah publik sering kali menghadapi stigma dan penolakan. Anggapan bahwa perempuan kurang memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin atau pembuat keputusan menciptakan hambatan yang signifikan bagi mereka untuk berpartisipasi secara setara, terutama dalam politik.

⁴ Ade Irma Sakina and Dessy Hasanah Siti A., "*Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia*," Share : Social Work Journal 7, no. 1 (2017): <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>.

Meskipun sudah ada kebijakan afirmatif seperti kuota 30% keterwakilan perempuan, implementasinya tidak selalu berhasil karena masih kuatnya nilai-nilai patriarkal di masyarakat. Banyak partai politik yang tidak sepenuhnya mendukung perempuan dalam pencalonan, baik karena faktor budaya maupun karena ketidakpercayaan terhadap kemampuan mereka. Hal ini diperburuk oleh stereotip yang sering kali meragukan kompetensi perempuan, di mana perempuan dinilai berdasarkan standar ganda yang tidak diterapkan pada laki-laki.

Selain itu, patriarki juga menimbulkan beban ganda bagi perempuan. Mereka dihadapkan pada ekspektasi untuk tetap menjalankan peran domestik, seperti mengurus keluarga, sekaligus menghadapi tuntutan untuk bersaing di ranah publik. Beban ini menjadi salah satu alasan mengapa banyak perempuan tidak dapat sepenuhnya terlibat dalam kegiatan politik, bahkan ketika peluang itu tersedia.

Dengan demikian, patriarki bukan hanya menciptakan ketimpangan gender, tetapi juga menjadi penghalang yang sistemik bagi perempuan untuk memperoleh hak dan kesempatan yang setara. Hal ini tercermin dalam rendahnya tingkat keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga legislatif, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi mereka. Menelusuri bagaimana patriarki bekerja dalam masyarakat

memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai akar masalah ketimpangan ini serta peluang untuk menciptakan perubahan menuju kesetaraan.

Meskipun jumlah pemilih perempuan relatif besar, budaya patriarki menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan calon perempuan kalah, karena mereka percaya bahwa laki-laki akan memimpin di rumah dan dalam politik, dan mereka dianggap memiliki kekuatan yang lebih besar daripada perempuan⁵.

Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Pemilu, yang menetapkan partai politik sebagai peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, partai politik diharapkan dapat mencalonkan pemimpin yang dapat membawa perubahan dan dampak positif bagi masyarakat. Dalam praktiknya, keterwakilan perempuan dalam proses kaderisasi partai menjadi masalah penting dalam upaya meningkatkan partisipasi perempuan dan mencapai kesetaraan gender, terutama di bidang politik.

Suku Batak yang tinggal di Sumatera Utara memiliki budaya patriarki yang kuat, terutama dalam sistem keluarga patrilineal, di mana garis keturunan diambil dari pihak laki-laki. Laki-laki dianggap sebagai pewaris marga dan memegang kendali dalam pengambilan keputusan serta memiliki peran penting

⁵ Lusia Palulungan, Muhammad Taufan Ramli, and M Ghufan, *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*, BaKTI: Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia, 2020.

dalam struktur sosial dan politik. Perempuan Batak, meskipun memiliki peran dalam kehidupan ekonomi dan ritual, sering kali tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting baik di tingkat keluarga maupun di komunitas yang lebih luas.

Dalam politik, pengaruh patriarki ini sangat terlihat pada rendahnya jumlah perempuan yang terlibat di lembaga pemerintahan atau eksekutif. Meskipun sudah ada peraturan seperti Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menetapkan kuota untuk keterwakilan perempuan, pelaksanaannya di masyarakat Batak masih menghadapi hambatan budaya. Banyak pihak masih melihat politik sebagai wilayah yang lebih cocok untuk laki-laki. Selain itu, lembaga adat yang berfungsi untuk mengambil keputusan penting juga masih didominasi laki-laki, sehingga perempuan sulit mendapatkan akses ke posisi strategis.

Meskipun perempuan adalah kelompok pemilih terbesar, jumlah mereka yang duduk di parlemen sangat kecil. Wakil perempuan sering kali adalah laki-laki yang tidak memahami permasalahan perempuan dan kelompok marjinal.⁶

Fenomena yang mendasari penelitian ini adalah, keterwakilan perempuan di Provinsi Sumatera Utara yang belum mencapai 30% dalam

⁶ *Ibid*, hlm. 6.

lembaga legislatif periode 2024-2029 dapat dikaitkan erat dengan budaya patriarki yang kuat dalam masyarakat Batak. Sebagai kelompok etnis mayoritas di Sumut, masyarakat Batak secara tradisional menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama, baik dalam keluarga maupun di ruang publik. Struktur sosial yang patriarkal ini mengakar kuat, menciptakan norma yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat, sehingga membatasi akses mereka ke ruang politik.

Studi lain yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini adalah Deby Silviani "Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Kegagalan Calon Legislatif Perempuan di DPRD Kota Sungai Penuh Tahun 2019"⁷. Penelitian ini berfokus pada bagaimana budaya patriarki di Kota Sungai Penuh mempengaruhi kegagalan calon legislatif perempuan dalam pemilihan legislatif tahun 2019. Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menekankan bahwa budaya patriarki tetap kuat meskipun ada kebijakan afirmatif, yang membuat perempuan sulit berpartisipasi dalam politik.

Penelitian kedua oleh Herwin Napitupulu berjudul "Keterwakilan Perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Periode 2019-2024 di Kabupaten Toba" berfokus pada keterwakilan perempuan dalam DPRD di Kabupaten Toba selama periode 2019-2024. Perbedaan mendasar dengan

⁷ D Silviani, F Bafadhal, and S D Elsi, "Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Kegagalan Calon Legislatif Perempuan Di Dprd Kota Sungai Penuh Tahun 2019" (2021), <https://repository.unja.ac.id/29121/>.

penelitian Deby adalah, penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, dan tidak menitikberatkan pada kegagalan kandidat perempuan, melainkan pada sejauh mana perempuan sudah berhasil terwakili dalam politik di DPRD Toba, serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keterlibatan mereka.⁸

Sementara itu, penelitian ini memiliki lingkup yang berbeda. Fokusnya terletak pada keterwakilan perempuan dalam DPRD di Provinsi Sumatera Utara, dengan periode yang lebih baru, yakni 2024-2029. Sedangkan, penelitian untuk keterwakilan perempuan di Sumatera Utara menggunakan metode yang berbeda, yaitu kuantitatif deskriptif dengan jumlah responden yang lebih besar.

Maka berdasarkan fenomena yang terjadi, perlu dilakukan kajian lebih mendalam dengan melakukan penelitian mengenai “PENGARUH PATRIARKI TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA PERIODE 2024-2029”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Keterwakilan Perempuan Di DPRD Sumatera Utara?

⁸ Herwin P Napitupulu, “Keterwakilan Perempuan Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Periode 2019-2024 Di Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara” 1 (2023).

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis budaya patriarki mempengaruhi Keterwakilan Perempuan di DPRD Sumatera Utara

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, akademisi, dan peneliti lainnya. Manfaat penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan menganalisis kondisi budaya patriarki di Sumatera Utara serta bagaimana budaya patriarki mempengaruhi keterwakilan perempuan di DPRD Sumatera Utara dari tahun 2024 hingga 2029. Selain itu, penelitian ini dapat membantu penulis menjadi lebih baik dalam mempelajari fenomena yang terjadi.

b. Manfaat Praktis

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak terkait untuk mengetahui sejauh mana budaya patriarki memengaruhi partisipasi politik perempuan. Selain itu, peneliti diharapkan dapat memberikan informasi tambahan sebagai sumber acuan bagi pihak lain yang ingin meneliti masalah yang sama.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Teori Patriarki

Patriarki merupakan konsep sentral dalam kajian feminisme yang menggambarkan sistem sosial di mana laki-laki memegang posisi dominan atas perempuan, baik dalam ranah domestik maupun publik. Dalam kajian sosiologi dan ilmu politik, patriarki sering kali menjadi kerangka teoritik untuk menganalisis ketimpangan gender, khususnya dalam hal akses terhadap sumber daya, kekuasaan, dan representasi politik. Salah satu tokoh penting yang mengembangkan teori patriarki secara lebih struktural dan komprehensif adalah Sylvia Walby, seorang sosiolog feminis asal Inggris. Walby mengkaji patriarki sebagai suatu sistem yang tidak hanya bekerja melalui relasi personal, tetapi juga melekat dalam institusi sosial, hukum, dan budaya.

Dalam bukunya yang berjudul *Theorizing Patriarchy*, Walby menjelaskan bahwa patriarki adalah "sistem sosial di mana laki-laki mendominasi, menindas, dan mengeksploitasi perempuan". Ia membedakan antara patriarki privat dan patriarki publik. Patriarki privat terjadi dalam lingkungan rumah tangga atau keluarga, di mana perempuan berada di bawah kontrol langsung laki-laki. Sementara itu, patriarki publik muncul dalam institusi sosial seperti tempat kerja, lembaga pendidikan, negara, dan partai politik, di mana dominasi laki-laki bersifat lebih impersonal, tetapi tetap sistemik dan mengakar kuat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa patriarki telah

mengalami pergeseran bentuk namun tetap mempertahankan esensi ketimpangan relasi kuasa⁹.

Untuk memahami cara kerja sistem patriarki dalam kehidupan masyarakat, Walby mengidentifikasi enam struktur utama yang menjadi arena dominasi laki-laki terhadap perempuan, yaitu: (1) keluarga, (2) pekerjaan upahan, (3) negara, (4) kekerasan, (5) seksualitas, dan (6) budaya. Setiap struktur ini tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling terkait dan saling memperkuat. Misalnya, ketimpangan dalam keluarga akan berdampak pada peluang perempuan dalam pekerjaan, dan ketimpangan dalam dunia kerja dapat berpengaruh pada keterwakilan perempuan dalam politik¹⁰.

Pertama, struktur keluarga dipandang sebagai tempat pertama berlangsungnya relasi patriarkis. Dalam keluarga, perempuan sering kali dibebani dengan tanggung jawab domestik yang besar, seperti mengurus anak, rumah tangga, dan kebutuhan emosional anggota keluarga lainnya. Peran ini bukan hanya membatasi ruang gerak perempuan untuk mengakses ruang publik, tetapi juga membentuk persepsi masyarakat bahwa tugas utama perempuan adalah di rumah, bukan di ruang publik seperti politik.

Kedua, struktur pekerjaan upahan menggambarkan bagaimana perempuan sering kali ditempatkan dalam posisi pekerjaan yang tidak setara

⁹ Sylvia Walby, "1990_Walby_Theorising_Patriarchy_book_Blackwell.Pdf," 1990, hlm 16.

¹⁰ Ibid., hlm 17.

dengan laki-laki, baik dari segi jabatan, penghasilan, maupun stabilitas kerja. Dalam banyak kasus, perempuan juga menghadapi diskriminasi struktural di tempat kerja, termasuk dalam kesempatan promosi atau pengambilan keputusan. Hal ini berkontribusi pada rendahnya representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan, termasuk dalam bidang politik dan pemerintahan.

Ketiga, struktur negara berkaitan dengan bagaimana institusi negara, termasuk sistem hukum dan partai politik, mereproduksi ketimpangan gender. Walby menunjukkan bahwa kebijakan negara sering kali tidak netral gender, melainkan secara tidak langsung memperkuat dominasi laki-laki. Misalnya, meskipun terdapat kebijakan afirmatif seperti kuota 30% keterwakilan perempuan, partai politik sebagai bagian dari sistem negara sering kali hanya mencalonkan perempuan untuk memenuhi persyaratan administratif tanpa memberikan dukungan substantif. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi patriarki tetap berlangsung melalui mekanisme formal negara.

Keempat, struktur kekerasan merujuk pada kekerasan berbasis gender, baik fisik, psikologis, maupun simbolik, yang digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kontrol laki-laki terhadap perempuan. Dalam konteks politik, kekerasan terhadap perempuan dapat muncul dalam bentuk intimidasi, pelecehan, hingga serangan terhadap integritas pribadi caleg perempuan. Kekerasan ini tidak hanya berdampak pada korban secara individu, tetapi juga menghambat partisipasi politik perempuan secara luas.

Kelima, struktur seksualitas mencakup cara pandang dan norma sosial mengenai seksualitas yang dikonstruksikan secara gender dan sering kali memihak laki-laki. Perempuan yang aktif secara politik, misalnya, kerap distigmatisasi secara seksual atau diragukan moralitasnya. Pandangan ini memperkuat persepsi negatif terhadap perempuan yang mencoba menembus ruang-ruang kekuasaan.

Keenam, struktur budaya merujuk pada sistem nilai, norma, agama, pendidikan, dan media massa yang turut mempertahankan ideologi patriarki. Budaya memegang peranan penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap peran gender. Dalam masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai patriarkis, seperti di sebagian besar komunitas tradisional di Indonesia termasuk masyarakat Batak di Sumatera Utara, perempuan sering kali dianggap tidak layak menjadi pemimpin. Pandangan ini mempengaruhi secara langsung terhadap dukungan yang diterima oleh perempuan dalam kontestasi politik.

Dalam konteks penelitian ini, fokus diarahkan pada tiga struktur utama dari teori patriarki Walby yang paling relevan terhadap rendahnya keterwakilan perempuan di bidang politik, yaitu: budaya, negara (terutama peran partai politik), dan representasi gender dalam persepsi publik. Pertama, struktur budaya menjelaskan bagaimana nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat membentuk persepsi tentang peran perempuan dalam politik. Kedua, struktur negara menggambarkan bagaimana lembaga formal seperti partai politik sering

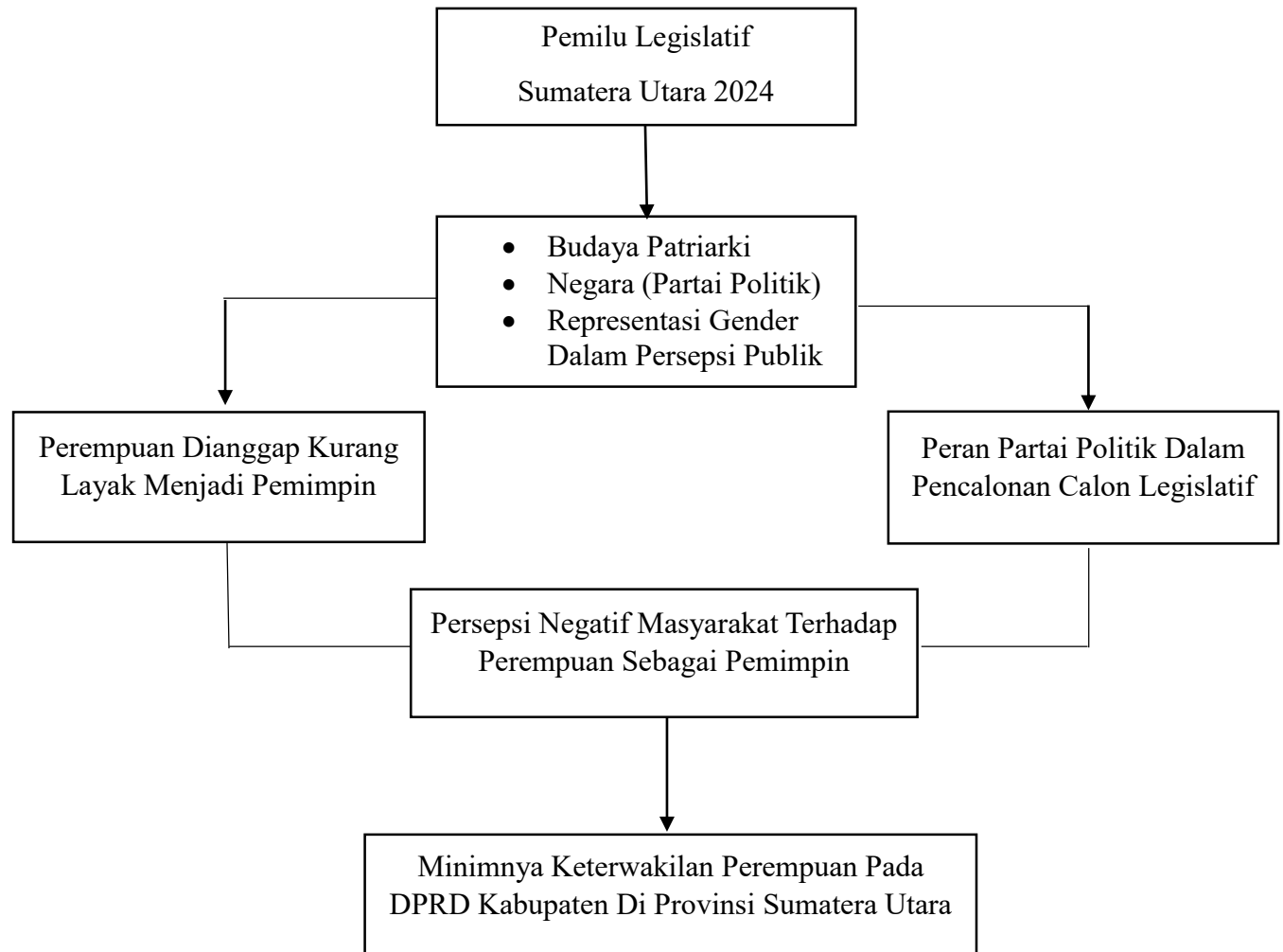
kali kurang memberikan dukungan nyata terhadap caleg perempuan. Ketiga, representasi gender dalam persepsi publik menunjukkan bagaimana masyarakat masih memandang perempuan sebagai kurang layak menjadi pemimpin politik, yang pada akhirnya mempengaruhi keputusan memilih dalam pemilu.

Dengan menggunakan kerangka teori patriarki Sylvia Walby, penelitian ini berupaya menjelaskan bahwa rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara bukan hanya soal pilihan pemilih secara individual, melainkan merupakan hasil dari struktur sosial patriarkis yang terus direproduksi melalui budaya, institusi politik, dan persepsi masyarakat.

Penelitian ini menggunakan teori patriarki karena teori ini secara langsung mengkaji sistem sosial dan budaya yang memberikan dominasi laki-laki dan subordinasi perempuan. Patriarki menjelaskan bagaimana ketidaksetaraan gender berasal dari struktur sosial, hukum, dan budaya yang memprioritaskan kekuasaan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik. Dalam konteks politik, sistem patriarki sering menggunakan undang-undang dan legislatif untuk membatasi peran perempuan.

1.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan keterkaitan antara teori – teori ataupun konsep yang akan mendukung kegiatan penelitian sebagai pedoman dalam menyusun alur penelitian.



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

Gambar diatas menjelaskan bahwa penelitian ini berlandaskan pada kegiatan pemilihan umum legislatif di Provinsi Sumatera Utara tahun 2024, Budaya patriarki yang mengakar dalam masyarakat Batak menjadi faktor utama yang mempengaruhi rendahnya keterwakilan perempuan pada DPRD Kabupaten di Sumatera Utara. Budaya tersebut membentuk persepsi negatif terhadap kemampuan perempuan dalam memimpin, yang kemudian

mempengaruhi minimnya dukungan politik dan sosial terhadap caleg perempuan. Hal ini menyebabkan rendahnya perolehan suara perempuan dalam pemilu, sehingga keterwakilan mereka di parlemen menjadi sangat terbatas. Alur ini sesuai dengan teori patriarki Sylvia Walby yang menyoroti dominasi laki-laki dalam struktur sosial sebagai hambatan utama bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam politik.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Metode yang dipilih dalam penelitian ini, menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah mendeskripsikan, meneliti, dan menjelaskan sesuatu yang dipelajari apa adanya, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang dapat diamati dengan menggunakan angka-angka.

Penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang hanya menggambarkan isi suatu variabel dalam penelitian, tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu. Dengan demikian dapat diketahui bahwa penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang menggambarkan, mengkaji dan menjelaskan suatu fenomena dengan data (angka) apa adanya tanpa bermaksud menguji suatu hipotesis tertentu¹¹.

¹¹ Wiwik Sulistyawati and Sabekti Trinuryono , Wahyudi, “*Analisis Motivasi Belajar Siswa Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Blended Learning Saat Pandemi Covid-19* (Deskriptif Kuantitatif Di Sman 1 Babadan Ponorogo),” *Kadikma* 13, no. 1 (2022): hlm 68-73,

1.7.2 Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Provinsi Sumatera Utara karena peneliti melihat minimnya keterwakilan perempuan di DPRD Sumatera Utara periode 2024-2029.

1.7.3 Populasi dan Sampel

1.7.4 Populasi

Populasi merupakan keseluruhan atau sekumpulan individu, objek, atau entitas yang memiliki karakteristik atau sifat tertentu yang menjadi fokus penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹²

Dalam penelitian ini, populasi adalah kelompok masyarakat yang didaftarkan sebagai DPT di delapan kabupaten di Sumatera Utara, dengan keterwakilan perempuan berkisar antara 0% dan 6%, seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.1, dan jumlah DPT ditunjukkan pada tabel berikut:

¹² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020, hlm 80.

Tabel 1. 3
Jumlah DPT Setiap Kabupaten di Sumatera Utara

No	Nama Kabupaten	Total Penetapan Pemilih Dpt		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	TAPANULI UTARA	110,540	115,149	225,689
2	DELI SERDANG	708,220	723,198	1,431,418
3	DAIRI	111,893	115,327	227,220
4	NIAS SELATAN	103,682	107,337	211,019
5	PAKPAK BHARAT	18,775	18,658	37,433
6	HUMBANG HASUNDUTAN	69,794	71,659	141,453
7	PADANG LAWAS	88,514	89,772	178,286
8	LABUHANBATU UTARA	138,023	137,154	275,177
TOTAL DPT		1,349,441	1,378,254	2,727,695

Sumber: opendata.kpu.go.id

1.7.5 Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih untuk diambil data dan dijadikan dasar untuk diteliti. sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan ukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan suatu penelitian. Bila populasi besar serta sulit dilaksanakan oleh peneliti untuk memperdalam semua yang ada pada populasi, seperti adanya keterbatasan tenaga, waktu dan dana yang diperlukan, maka peneliti dapat menggunakan sebagian sampel yang diambil dari populasi

tersebut. Sampel yang diambil dari populasi tersebut harus representatif atau dapat mewakili seluruh populasi.

Dalam penelitian ini, rumus Slovin digunakan untuk menentukan ukuran sampel. Karena populasi yang akan diteliti berjumlah lebih dari seribu, peneliti menggunakan teknik sampel *Slovin* untuk menentukan ukuran sampel¹³.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n= jumlah responden

N= jumlah populasi / jumlah DPT

e= terjadinya kesalahan (10%)

Berdasarkan rumus slovin tersebut, maka diperoleh besarnya sampel (responden) sebagai berikut:

$$n = \frac{2.727.695}{1+2.727.695 (10\%)^2}$$

$$n = \frac{2.727.695}{1 + 27.276,95}$$

$$n = \frac{2.727.695}{27.277,95}$$

$$n = 99,9 \text{ (dibulatkan 100)}$$

¹³ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan.*, 2016.

Pada penelitian ini sampel yang akan diambil sebesar 100 responden. Kuisisioner akan disebarakan secara online dengan menggunakan google form melalui media sosial, zoom, dan Email agar memenuhi responden sesuai yang di teliti.

1.7.6 Teknik Sampling

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik proportional random sampling.

a. Teknik Proportional Random Sampling

Teknik sampling yang digunakan yaitu *Probability Sampling*. Probability Sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan yaitu teknik proportionate stratified random sampling. “*proportionate random sampling* digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional”.¹⁴

Alasan menggunakan teknik proportionate random sampling adalah pengambilan anggota sampel diambil dari populasi dengan cara undian. Mengambil sampel dengan cara undian cukup

¹⁴ Sugiyono, op.cit., hlm 82.

sederhana dan untuk menghindari ketidakadilan dalam populasi penelitian tersebut.

Peneliti menggunakan rumus berikut untuk membagi sampel ke tiap Kabupaten:

$$\text{Yamane: } n = \frac{n_1 \times n}{N}$$

Keterangan:

n_1 = Jumlah DPT tiap Kabupaten

n = Jumlah sampel pada populasi awal

N = Jumlah Populasi (DPT) Keseluruhan

Berdasarkan perhitungan dengan rumus diatas maka dapat ditentukan berapa jumlah sampel untuk disetiap Kabupaten. Peneliti menggunakan *Proportional Random Sampling* di mana sampel yang diambil secara acak di masyarakat.

Maka hitungan untuk jumlah sampel di 8 kabupaten adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 4
Perhitungan Sampel Penelitian

NO	Kabupaten	Perhitungan	Jumlah Sampel
1	TAPANULI UTARA	$\frac{225.689 \times 100}{2,727,695}$	8
2	DELI SERDANG	$\frac{1.431.418 \times 100}{2,727,695}$	52
3	DAIRI	$\frac{227.220 \times 100}{2,727,695}$	8
4	NIAS SELATAN	$\frac{211.019 \times 100}{2,727,695}$	8
5	PAKPAK BHARAT	$\frac{37.433 \times 100}{2,727,695}$	2
6	HUMBANG HASUNDUTAN	$\frac{141.453 \times 100}{2,727,695}$	5
7	PADANG LAWAS	$\frac{178.286 \times 100}{2,727,695}$	7
8	LABUHANBATU UTARA	$\frac{275.177 \times 100}{2,727,695}$	10

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka di dapat sampel seperti pada tabel berikut:

Tabel 1. 5
Jumlah Sampel Penelitian

No	Kabupaten	Sampel
1	Padang Lawas	7
2	Labuhan Batu Utara	10
3	Pakpak Bharat	2
4	Humbang Hasundutan	5
5	Tapanuli Utara	8
6	Deli Serdang	52
7	Dairi	8
8	Nias Selatan	8
TOTAL SAMPEL		100

1.7.7 Sumber Data

Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis memperoleh data yang bersumber dari data primer dan sekunder.

- a. Data Primer: merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian adalah kuisioner (angket), yang merupakan serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis dan dibagikan kepada responden untuk dijawab.
- b. Data Sekunder: data sekunder diperoleh dari literatur dan penelitian lain dan digunakan sebagai pendukung data primer yang berkaitan dengan judul proposal skripsi ini.

1.7.8 Teknik pengumpulan data

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian adalah teknik pengumpulan data, karena tujuan

penelitian adalah untuk mendapatkan data. Untuk mendapatkan data ini, peneliti menggunakan metode kuisisioner (angket), Dokumentasi, dan studi kepustakaan.

a. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.¹⁵ Kuesioner disusun dalam bentuk pernyataan dan disebarkan yang sifatnya tertutup untuk mengetahui pengaruh patriarki terhadap keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2024-2029.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi ini merekam semua hasil wawancara dan keterangan yang diberikan oleh informan¹⁶.

¹⁵ Ibid., hlm 124.

¹⁶ Ibid., hlm 240.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah.

Data diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaitkan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi yakni literatur tentang budaya patriarki dan keterwakilan perempuan. Langkah ini dipakai sebagai landasan teoritis serta pedoman dalam menganalisa masalah.

1.7.9 Uji Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Uji validitas merupakan persamaan data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang diperoleh langsung yang terjadi pada subyek penelitian. Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas pada setiap pertanyaan apabila r hitung $>$ r tabel pada taraf signifikan ($\alpha = 0,05$) maka instrument itu dianggap tidak valid

dan jika $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$ maka instrument dianggap tidak valid.¹⁷

Dalam hal ini, peneliti menggunakan $r \text{ tabel} = 0,1966$ ($N = 100$ atau $df - 2$).

Validitas menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk mencari validitas sebuah item, kita mengkorelasikan skor item dengan total item-item tersebut. Jika koefisien antara item dengan total item sama atau diatas 0,3 maka item tersebut dinyatakan valid, tetapi jika nilai korelasinya dibawah 0,3 maka item tersebut dinyatakan tidak valid¹⁸.

b. Uji Realibilitas

Uji reliabilitas adalah derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Data yang tidak reliabel, tidak dapat di proses lebih lanjut karena akan menghasilkan kesimpulan yang bias. Suatu alat ukur yang dinilai reliabel jika pengukuran tersebut menunjukkan hasil-hasil yang konsisten dari waktu ke waktu.¹⁹

Uji reliabilitas dilakukan setelah uji validitas dan di uji merupakan pernyataan atau pertanyaan yang sudah valid. Cronbach's alpha yang besarnya antara 0,50-0,60. Dalam penelitian ini peneliti memilih 0,60

¹⁷ Ibid., hlm 267.

¹⁸ Ibid., hlm 177.

¹⁹ Ibid., hlm 268.

sebagai koefisien reliabilitasnya. Adapun kriteria dari pengujian reliabilitas adalah:

- a. Jika nilai cronbach's alpha $\alpha > 0,60$ maka instrumen memiliki reliabilitas yang baik dengan kata lain instrument adalah reliabel atau terpercaya.
- b. Jika nilai cronbach's alpha $\alpha < 0,60$ maka instrumen yang diuji tersebut adalah tidak reliable.

1.7.10 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif yang mana teknik analisis yang peneliti gunakan disini ialah statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah analisis statistik yang memberikan gambaran secara umum tentang mengenai karakteristik masing-masing variabel penelitian yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), minimum dan maximum. Analisis deskriptif adalah statistic yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.²⁰

Analisis ini digunakan dalam menggambarkan demografi responden untuk mengetahui jumlah responden yang akan dibagi sesuai karakteristik yang telah ditentukan, yaitu pertama berdasarkan

²⁰ Ibid., hlm 147.

karateristik demografi meliputi usia dan jenis kelamin. Dimana deskripsi responden tersebut akan ditampilkan dalam bentuk diagram dan tabel beserta dengan uraian.

1.7.11 Teknik Pengolahan Data

Dalam teknik pengelolaan data ini, penulis mengombinasikan penggunaan Microsoft Excel dan SPSS untuk menganalisis hasil penelitian. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah Kuesioner/angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan kepada responden untuk di jawabnya. Kuesioner akan disebar kepada responden yaitu masyarakat yang keterwakil perempuannya rendah melalui jaringan internet dengan menggunakan google forms agar memungkinkan responden mengisi kuesioner dengan cepat dan efisien.

Pernyataan dalam kuesioner diukur menggunakan skala likert, skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang tentang fenomena minimnya keterwakilan perempuan. Kombinasi ini memberikan kontribusi dalam mengevaluasi persepsi masyarakat terhadap keterwakilan politik perempuan serta memberikan rekomendasi yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan.

Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berubah pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradiasi yang sangat positif sampai sangat negatif yang dapat berupa kata-kata berikut:²¹

Tabel 1. 6
Alternatif Jawaban dengan Skala Likert

No	Pernyataan	Kode	Penilaian
1	Sangat Tidak Setuju	STS	1
2	Tidak Setuju	TS	2
3	Setuju	S	3
4	Sangat Setuju	SS	4

Selain memberikan skor pada variabel Pengaruh Patriarki terhadap keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2024-2029, penulis juga menyediakan ruang bagi responden untuk mengungkapkan alasan mereka. Hal ini mencakup alasan responden yang memilih untuk tidak memilih calon DPRD perempuan serta alasan yang diberikan bagi mereka yang memilih calon DPRD laki-laki dalam

²¹ Ibid., hlm 152.

pemilihan umum. Setiap alasan tersebut kemudian akan diberi skor angka untuk mempermudah pengolahan data oleh peneliti, seperti:

Apa yang menjadi alasan Anda memilih calon laki-laki	Skor
Saya beranggapan bahwa laki-laki lebih layak untuk memimpin daripada perempuan	1
Saya merasa bahwa calon laki-laki lebih dikenal oleh masyarakat dibandingkan dengan calon perempuan	2
Saya cenderung memilih calon laki-laki karena mereka berada di posisi teratas dalam daftar calon	3
Saya melihat bahwa mayoritas pemimpin dalam partai politik adalah laki-laki, yang mempengaruhi pilihan saya	4

Apa yang menjadi alasan Anda tidak memilih calon perempuan	Skor
Saya percaya bahwa perempuan seharusnya lebih fokus pada tugas rumah tangga	1
Saya tidak memiliki pengetahuan atau informasi tentang calon perempuan untuk DPRD	2
Saya cenderung tidak memilih perempuan karena mereka berada di posisi terakhir dalam daftar calon	3
Saya merasa bahwa partai politik tidak memberikan dukungan yang memadai kepada calon perempuan	4

1.7.12 Defenisi Operasional Variabel

Operasionalisasi variabel penelitian artinya menjelaskan variabel secara terperinci menjadi beberapa bagian yaitu indikator, pertanyaan dan skala pengukuran serta sumber yang dijadikan referensi. Variabel-

variabel tersebut akan dijelaskan dalam operasionalisasi variabel agar lebih memperjelas variabel-variabel yang akan diteliti.

Tabel 1. 7
Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Sub Indikator	Butir Soal
1	Budaya Patriarki (X)	Budaya patriarki merupakan sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan, yang termanifestasi dalam struktur budaya, negara, dan representasi gender, sebagaimana dikemukakan oleh Sylvia Walby.	Budaya	- Pandangan bahwa laki-laki lebih pantas memimpin	1-7
				- Stereotip perempuan dalam politik	
				- Hambatan budaya dan peran domestik	
			Negara (Partai Politik)	- Dominasi laki-laki dalam kepemimpinan politik	8
			Representasi Gender dalam Persepsi Publik	- Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan	9

2	Keterwakilan Perempuan (Y)	Keterwakilan perempuan di DPRD merupakan bentuk partisipasi politik substantif yang mencerminkan tercapainya representasi gender di lembaga legislatif	—	- Penerapan kuota 30% dalam pencalonan legislatif	10
---	----------------------------	--	---	---	----